

## **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA BAGI PRIA DI DESA MELIAU HILIR KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU**

**Oleh:  
Eka Hariyanti Susanto  
NIM. E01107004**

**Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak.  
E-mail: [ekahariyantisusanto@yahoo.co.id](mailto:ekahariyantisusanto@yahoo.co.id)**

### **ABSTRAK**

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini ialah perkembangan pelaksanaan program peningkatan kesertaan Keluarga Berencana bagi pria dilapangan belum seperti yang diharapkan yaitu dari segi komunikasi penyuluhan, bimbingan, motivasi, dan konseling kepada masyarakat khususnya bagi kaum pria itu masih perlu ditingkatkan lagi. Dari segi sikap, para penerima program KB priamasih tergolong kurang baik sehingga dapat dikatakan bahwa sikap masyarakat terhadap program tersebut adalah sikap yang negatif maka sebagian besar dari mereka menolak adanya MOP. Masalah yang diteliti adalah kebijakan pemerintah dalam implementasi program keluarga berencana bagi pria ditinjau dari aspek komunikasi dan sikap. Teori menurut G. Edward III dalam Nawawi (2009:136), untuk mengungkapkan masalah yang ada yaitu difokuskan pada sikap dan komunikasi implementator pada kebijakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif.

Hasil dan kesimpulan penelitian yaitu Komunikasi yang terdapat dalam Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Meliau Hilir kurang baik, dikarenakan adanya transmisi informasi antar implementor yang kurang lancar, dan butuh kejelasan dalam program tersebut. Disposisi dalam Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Meliau Hilir sebagian besar masih enggan menerima program yang ada dikarenakan mereka tidak benar-benar memahami manfaat MOP itu sendiri. Saran penelitian meningkatkan mutu kader KB di Desa Meliau Hilir, mengadakan perlombaan pembuatan program kerja, untuk melatih agar kader memiliki inovasi baru dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana bagi pria di Desa Meliau Hilir, perbaiki jaringan komunikasi demi tercapainya tujuan bersama.

**Kata-kata kunci : Implementasi Program Keluarga Berencana, Pria,  
Komunikasi, dan Disposisi**

## **ABSTRACT**

The background of this research is the development of the implementation of family planning programs to increase the participation of men in the field has not been as expected, namely in terms of communication counseling, guidance, motivation, and counseling to the community, especially for men that still needs to be improved further. In terms of attitude, the recipients of the family planning program is still relatively poor man so that it can be said that public attitudes toward the program is a negative attitude then most of them rejected the MOP. The problem under study is the policy of the government in the implementation of family planning programs for men in terms of aspects of communication and attitude. Theory by G. Edward III in the Nawawi (2009: 136), to reveal the existing problems are focused on attitudes and communication on policy implementer. The method used is descriptive research.

The results and conclusions of the study are contained in the Implementation of Communication Family Planning Program For Men in the village of Lower Meliau unfavorable, due to the transmission of information between the implementor substandard, and need clarity in the program. Disposition in the implementation of the Family Planning Program For Men in the village of Lower Meliau still largely reluctant to accept the existing programs because they do not really understand the benefits of MOP itself. Suggestions researchers improve the quality of family planning cadres at Downstream Meliau Village, entered the race making the program work, to train for cadres have a new innovation in order to succeed the family planning program for men in the village of Lower Meliau, improvement of communication networks in order to achieve common goals.

**Keywords:** Implementation of Family Planning, Men, Communication, and Disposition



## PENDAHULUAN

Dewasa ini, belum semua Pemerintahan Kabupaten/Kota Kalimantan Barat menaruh perhatian besar terhadap pembangunan berwawasan kependudukan termasuk program KB bagi pria. Apabilakondisi ini terus berlangsung dikhawatirkan selain sasaran program tidak tercapaijuga berbagai upaya mengatasi permasalahan yang masih dihadapi menjaditerhambat. Perkembangan pelaksanaan program peningkatan kesertaan Keluarga Berencana bagi Pria dilapangan ternyata belum seperti apa yang diharapkan. Dalam kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi program yang dilaksanakan, antara lain : operasionalisasi program yang dilaksanakan selama ini lebih mengarah kepada wanita sebagai sasaran, penyiapan tempat pelayanan, tenaga pelayanan dan juga penyediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) untuk pria sangat terbatas, karena hamper semuanya adalah untuk wanita, demikian juga adanya prioritas penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang juga hampir semuanya untuk wanita.

Oleh karena itu, kebijakan dan program kependudukan termasuk program Keluarga Berencana (KB) bagi pria tidak semata-mata hanya sebagai upaya mempengaruhi pola dan arah demografi tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Kebijakan ini dimaksudkan agar keluarga bersikap dan berperilaku sebagai keluarga kecil dengan

memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi sosial ekonomi, dan sosial budaya. Untuk itu, pengaturan kelahiran ditetapkan berbagai kebijakan operasional yang antara lain menyangkut penetapan jumlah anak yang ideal, jarak kelahiran anak, dan usia ideal melahirkan.

Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengontrol jumlah dan jarak kelahiran anak, untuk menghindari kehamilan yang bersifat sementara dengan menggunakan kontrasepsi sedangkan untuk menghindari kehamilan yang sifatnya menetap yang bisa dilakukan dengan cara sterilisasi.

Kontrasepsi merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi sehingga dapat mengurangi resiko kematian dan kesakitan dalam kehamilan. Konsep keluarga kecil dua anak cukup dengan cara mengatur jarak kelahiran melalui berbagai metode kontrasepsi masih tetap menjadi perhatian program KB di Indonesia dalam era baru saat ini.

Kesadaran kaum laki-laki Indonesia khususnya di Kalimantan Barat untuk berperan serta dalam program keluarga berencana (KB) masih sangat rendah. Selama ini laki-laki beranggapan bahwa urusan KB adalah urusan domestik perempuan, karena erat hubungannya dengan proses reproduksi dan reproduksi yang dimaksud adalah reproduksi perempuan. Saat ini banyak suami yang mengerti akan kesehatan reproduksi serta partisipasinya dalam menjaga kesehatan reproduksi baik dalam menjaga kesehatan

reproduksinya sendiri, pasangannya maupun anak keturunannya.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, telah dilakukan upaya untuk mereposisi peran petugas lapangan (PLKB/PKB). Dalam melaksanakan tugasnya dilapangan, PLKB/PKB pada dasarnya telah berperan baik sebagai pelaksana, pengelola (manajer), maupun dalam batas-batas tertentu bertindak sebagai pemimpin atau penggerak masyarakat.

Program Keluarga Berencana juga dilakukan demi kesejahteraan penduduk karena jumlah keluarga miskin masih cukup besar. Tapi sebagian perempuan mengiginkan banyak anak khususnya pada masyarakat yang miskin karena mereka berpikir anak-anak dapat membantu pekerjaan orangtua sehari-hari, dan merawat mereka di usia lanjut. Umumnya perempuan yang menghendaki pembatasan jumlah anak adalah perempuan yang sudah punya kesempatan belajar dan mencari nafkah sendiri, serta statusnya cukup setara dengan laki-laki dalam masyarakat. Maksud dengan diadakannya program KB adalah demi mensejahterakan masyarakat. Tapi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB, sehingga program tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal. Karena itu diperlukan upaya dari pemerintah agar masyarakat menyadari pentingnya melakukan KB sehingga program KB dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Ditingkat kesertaan Keluarga Berencana (KB) khususnya di Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau secara umum

didominasi oleh wanita, sedangkan pada pria tingkat kesertaannya masih sangat rendah, karena ada yang beranggapan bahwa KB pria merupakan hal yang lucu karena pria tidak akan pernah hamil.

Berdasarkan indikasi permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Meliau Kecamatan Meliau, dimana sebuah implementasi dapat dipahami sebagai suatu proses, hasil, dan dampak. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada pemahaman sikap dan komunikasi, karena minimnya intensitas komunikasi yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) pada masyarakat khususnya kaum laki-laki di Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau dan juga masih banyaknya para kaum laki-laki yang tidak mengetahui tentang MOP atau Vasektomi.

Berdasarkan latar belakang masalah untuk mengarahkan penelitian ini agar lebih jelas, peneliti merumuskannya yaitu "Mengapa Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau ditinjau dari Sikap dan Komunikasi belum berjalan efektif?".

## **KAJIAN TEORI**

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknis bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan

dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai dampak (outcome). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauhmana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial.

Pada dasarnya, penelitian implementasi merupakan suatu cara untuk mengetahui bagaimana suatu program dari suatu kebijakan itu dioperasionalkan, serta mencari tahu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah program. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warga negara merasa lebih aman dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan

social atau penetapan kebijakan pemberantasan teroris.

Menurut George Edward III dalam Nawawi (2009:136), ada empat variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Komunikasi : Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas.
- b. Sumber Daya : Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, sumber daya manusia, material maupun metoda. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.
- c. Disposisi atau Sikap : Suatu disposisi dalam implementasi kebijakan dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementator kebijakan yaitu seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan sifat demokratis.
- d. Struktur Birokrasi : Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka

miliki dalam menjalankan kebijakan. Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan.

Keluarga Berencana merupakan upaya pelayanan kesehatan preventif paling dasar dan utama. Untuk mengoptimalkan manfaat keluarga berencana bagi kesehatan, pelayanannya harus digabungkan dengan pelayanan kesehatan reproduksi yang telah tersedia. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan bagian program pembangunan nasional di Indonesia yang sudah dimulai sejak masa awal pembangunan lima tahun (1969) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dengan cara pengaturan kelahiran dan juga pengendalian pertumbuhan penduduk.

Pengertian Keluarga Berencana (KB) pada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Keluarga Berencana merupakan upaya (Gerakan) yang bertumpu pada kekuatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi secara positif terhadap upaya-upaya yang direncanakan.

## METODE

Dalam metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu untuk menjelaskan suatu masalah dengan menganalisa, dan menggambarkan gejala-gejala dengan membandingkan, menghubungkan, dan memilah-milah data yang ada sesuai dengan informasi yang ada di lapangan. Menurut Silalahi (2006:3), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antarvariabel dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif tersebut menggambarkan bahwa dalam penelitian diperlukan langkah-langkah yang bersifat terstruktur dalam memecahkan masalah yang didasari pada paradigma dan teori-teori menjadi pisau analisis, sehingga dapat terjawab persoalan yang ingin dijawab oleh peneliti. Namun, disini peneliti lebih menekan pada variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan tersebut.

Menurut Salim dalam bukunya yang berjudul Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (2001:84) : “untuk memahami validitas penelitian kualitatif perlu memiliki pengetahuan awal bahwa penggunaan atau penerapan teori penelitian (mencakup cara berpikir paradigmatis) menjadi acuan utama dalam pembuatan instrument penelitian. Pertama : dapat menggali sosok masalah yang seharusnya didapatkan dilapangan sesuai dengan kebenaran teori yang digunakan. Kedua : bagaimana setiap item instrument dapat menjadi tanda

adanya hubungan sebab akibat (sehingga padat diperkirakan adanya lingkup generalisasi yang menjadi dasar simpulan, kekuatan teori di atas empirik, pemahaman yang baik dan unsur replikasi yang terjadi dilapangan).”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi program keluarga berencana bagi pria di Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau, yang dilakukan oleh para PLKB/PKB guna meningkatkan peran serta pria dalam ber KB dan sikap yang dilakukan oleh instansi terkait upaya mengatasi rendahnya pengetahuan masyarakat khusus bagi pria tentang program keluarga berencana.

Yang menjadi objek penelitian ini adalah komunikasi dan sikap implementasi program keluarga berencana bagi pria di Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Subjek penelitian ini adalah para pelaku yang berperan dalam pelaksanaan atau berperan aktif dalam pertanggungjawaban kegiatan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Meliau Hilir.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Ini dilakukan agar fokus penelitian menjadi lebih jelas. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis “model interaktif” yang terdiri dari tiga komponen yaitu :

a. Meringkas (*reduksi*) hasil observasi dan wawancara : Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan direduksi dalam bentuk rangkuman atau intisari kemudian dilakukan editing terbatas,

tujuannya adalah data yang di analisis merupakan data yang benar-benar berkaitan dengan permasalahan peneliti.

b. Memaparkan (*display*) hasil observasi dan wawancara : Hasil observasi yang dilakukan disajikan dalam bentuk tulisan yang mudah dibaca sehingga memudahkan dalam melakukan analisis data.

c. Menyimpulkan (*verifikasi*) hasil observasi dan wawancara : Hasil observasi dan wawancara yang telah diringkas dan di presentasikan kemudian di ambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti (Moleong:2002).

### **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA BAGI PRIA DI DESA MELIAU HILIR KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU**

Suatu implementasi program akan dikatakan berhasil jika tujuan yang diinginkan tercapai. Berdasarkan model teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III (1980), implementasi dipengaruhi empat (4) variabel, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk penelitian ini peneliti mengambil 2 variabel dalam Edward III yaitu komunikasi dan disposisi (sikap) berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, yaitu dengan melihat banyaknya masyarakat yang tidak mengertitentang MOP/vasektomi menandakan bahwa proses komunikasi dan disposisi yang kurang baik dan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sampai saat ini tujuan belum tercapai secaramaksimal karena

minim informasi tentang vasektomi, banyak yang takut dengan ikut vasektomi akan menyebabkan impoten. Selain itu, rendahnya peranserta pria dalam MOP/vasektomi juga menunjukkan bahwa implementasi program yang ada selama ini masih belum optimal.

Implementasi Program KB bagi Pria hingga saat ini masih belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor penghambat di antaranya yaitu :

- a. kurang adanya komunikasi atau kerjasama antara petugas KB dan kader KB kepada para sasaran program KB bagi pria.
- b. Kurangnya fasilitas dan sumber-sumber pendukung program tersebut.
- c. Kurangnya pengetahuan tentang MOP/vasektomi dan keterampilan petugas KB dalam mengelola maupun melaksanakan program KB bagi pria.
- d. Ekonomi masyarakat yang rendah.
- e. Sikap kader yang kurang meyakinkan dalam mensosialisasikan dan mengajak pria untuk ber-KB.
- f. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya bagi pria dalam ber-KB.

Disamping faktor penghambat tersebut, juga ditemukan faktor pendukung yaitu adanya bantuan moril dan materiil baik dari pemerintah, swasta dan organisasi lainnya, baik berupa tenaga, dana dan sarana. Oleh karena itu, komunikasi menjadi salah satu alat guna mencapai sebuah tujuan. Demikian juga yang berlaku di dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Komunikasi dalam implementasi program keluarga berencana bagi pria di Desa Meliau Hilir dapat kita lihat dari 3 sisi komunikasi dalam Edward III di antaranya :

1. Dimensi Transmisi : dimana penyaluran informasi hasil wawancara peneliti dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) atau Petugas Keluarga Berencana (PKB) dalam implementasi program keluarga berencana bagi pria akan menghasilkan suatu implementasi yang baik apabila penyampaian informasi tersebut dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Komunikasi dalam melakukan penyampaian informasi ada beberapa cara, diantaranya : penyuluhan, KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi), bimbingan, motivasi, dan konseling.
2. Dimensi Kejelasan : dimana Komunikasi atau informasi yang diterima pihak pelaksana kebijakan dan juga pihak yang dikenakan kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Di dalam implementasi kebijakan, komunikasi sangat berpengaruh atas berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Adanya forum komunikasi, dimana dalam forum tersebut masyarakat dapat mengerti tentang program KB dengan MOP/vasektomi serta memiliki kesempatan untuk didengar pendapatnya meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Melalui komunikasi, dalam implementasi mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran dan oleh karena itu agar implementator dapat mengetahui hal apa saja, tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan maka komunikasi yang berjalan dalam jajaran implementator maupun pembuat kebijakan haruslah dilakukan dengan benar dan sejelas-jelasnya.

3. Dimensi Konsistensi : Sebuah konsistensi kebijakan tentu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, sebab kedua dimensi di depannya sudah mengalami permasalahan. Perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Se jauh ini dalam meneliti, peneliti menemukan bahwa informasi-informasi ataupun perintah-perintah yang diberikan kepada petugas lapangan KB sudah sesuai dengan isi dan tujuan Program Keluarga Berencana Bagi Pria.

Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan saja ditentukan oleh sejauh mana pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Sikap dapat didefinisikan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang timbul dari seseorang atau dari

suatu situasi. Disposisi atau sikap dari pelaksana (implementor) sebagai usaha mengimplementasikan kebijakan sehingga dapat berhasil seefektif dan seefisien mungkin. Namun, kendala yang cukup rumit yang dialami oleh para implementator ketika dalam proses implementasi adalah sikap dari pembuat keputusan yang tak searah pemikirannya.

Menurut Bapak Mujiyana selaku Petugas Keluarga Berencana (PKB) mengatakan bahwa *“untuk menjalankan program KB bagi pria ini mengalami berbagai kendala, antara lain sikap dari masyarakat cenderung dipengaruhi oleh keadaan masa lampaunya yang memandang, KB itu tugas wanita bukan pria. Wanitalah yang mengandung dan melahirkan jadi wanita harus ber-KB.”*

Dari wawancara dengan beberapa masyarakat khususnya pria yang tidak mengikuti program KB di Desa Meliau Hilir menuturkan :

*“bahwa KB laki-laki itu berbahaya dan dapat menyebabkan impotensi sehingga baik dari pihak pria / suami maupun wanita / istri tidak setuju pada program KB Pria melalui MOP, jadi lebih baik wanita saja yang melakukan KB asal jangan kami yang pria.”*

Selain itu, salah satu dari mereka juga menuturkan bahwa :

*“kami tidak mau ikut program KB karena kami malu dan takut untuk melakukan operasi itu, lagipula kami malah berharap kalau ada alat kontrasepsi untuk kami yang laki-laki ini seperti bentuk pil atau suntikan yang biasanya para wanita lakukan kami mau mengikutinya.”*

Dilain pihak masyarakat khususnya pria yang mengikuti

program KB melalui MOP ini, mengatakan bahwa :

*“saya ikut program ini karena hanya ingin membantu istri saya, karena kasihan istri saya kadang tidak cocok dengan alat kontrasepsinya.”*

Dilain pihak, salah satu pria yang menggunakan kondom juga mengatakan bahwa : *“saya tidak ikut program MOP, karena untuk mencegah atau menjarangkan masa kehamilan istri saya, saya menggunakan kondom, karena kami juga punya hak dan kewajiban yang sama dan setara.”*

Dalam pelaksanaan program KBPria, diharapkan adanya peranserta dari berbagai pihak baik dari wanita / istri maupun pria / suami. Kendala dalam peningkatan peranserta pria antara lain disebabkan oleh rendahnya pengetahuan pria akan metode KB yang ada. Mereka tidak mengetahui tujuan, fungsi, efek dari penggunaan metode yang ada.

Jumlah yang besar dan potensi yang tinggi, para pemuda mempunyai peluang yang besar untuk membangun keluarganya menjadi keluarga sejahtera dengan kesadaran kependudukan yang tinggi. Hal ini dapat terwujud apabila mereka membekali dirinya atau dibekali dengan wawasan KB sedini dan seluas mungkin. Mereka didorong kemauannya dan diberi kesempatan untuk berkarya sesuai dengan aspirasi modernisasi yang berkembang dengan cepat.

Untuk melaksanakan implementasi program ini maka diperlukan Kader dalam Keluarga Berencana Bagi Pria. Kader adalah mitra kerja dan bukan bawahan PLKB/PKB, sebagai mitra kerja

tentunya diperlukan unsur mitra yang saling menguntungkan. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan kesungguhan dan kerja serius dari PLKB dalam memproses suatu kegiatan menjadi suatu aktivitas desa seperti pertemuan-pertemuan KB sangat bermanfaat karena dapat dijadikan wadah untuk :

- a. Menyampaikan informasi, saling bertukar pendapat;
- b. Melakukan konsultasi dalam pengertian memecahkan masalah hambatan yang tidak dapat diatasi sendiri;
- c. Melakukan koordinasi dalam pengertian menyamakan keinginan, kegiatan dan cara melaksanakannya sehingga tujuan dapat dicapai;
- d. Menyusun rencana kegiatan;
- e. Menilai hasil kegiatan, karena setiap pertemuan KB harus dapat menghasilkan suatu rumusan hasil pertemuan antara lain rencana kegiatan yang disepakati untuk dilaksanakan.

Kader Keluarga Berencana adalah seseorang yang mampu dan rela menyumbangkan pemikiran, tenaga dan waktunya untuk membantu pemerintah sebagai media perantara dalam Program Keluarga Berencana (KB) dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta Kader KB dalam hal pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka pelebagaan dan pembudayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Kemudian, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader KB berfungsi sebagai motivator dalam pelaksanaan program KB bagi

pria dan juga tugasnya sebagai koordinator tentang perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program KB diwilayahnya sehingga merekalah yang lebih tahu apa yang harus dilakukan demi meningkatkan peran serta pria dalam ber-KB.

Mekanisme kerja yang harus dijalin dan dilakukan oleh Kader KB program KB bagi pria di Desa Meliau Hilir dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya adalah :

- a. Institusi yang perlu dihubungi di Desa Meliau Hilir untuk melakukan kegiatan program KB adalah Lurah/Kepala Desa di antaranya yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD) atau sejenisnya, Petugas Lapangan KB (PLKB), Karang Taruna, Pramuka, PKK, Tenaga Media yang ada di Desa Meliau Hilir, dan organisasi yang ada di Desa Meliau Hilir.
- b. Tugas yang dilakukan adalah membuat kesepakatan rencana kegiatan yang dilaksanakan Pembina Institusi Masyarakat, Komunikasi Informasi Edukasi, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pencatatan Pelaporan.
- c. Membuat anggaran dan menggali sumber dana yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilakukan.
- d. Menginventarisasikan tenaga yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilakukan.

Tingkat komitmen dan kejujuran implementor dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting dari pengaruh disposisi atau kecenderungan-kecenderungan, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat dipengaruhi

keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Keinginan dan kemauan seorang implementor bisa dilihat dari pengetahuan terhadap suatu kebijakan yang dijalankan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan implementor terhadap kebijakan tersebut.

Dalam melihat tingkat komitmen implementor atau petugas lapangan KB dalam melaksanakan implementasi program keluarga berencana bagi pria di Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau maka peneliti melihat dari segi kedisiplinan yang dimiliki implementor. Untuk bisa melihat tingkat kedisiplinan ini implementor melihat dari laporan rutin yang dilakukan oleh petugas lapangan KB dan juga berdasarkan keterangan dari petugas lapangan KB, pimpinan klinik KB Desa Meliau Kecamatan Meliau serta kaum pria yang menjadi target group dari kebijakan ini.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah, maka dari itu para pelaksana KB membutuhkan dukungan guna mencapai sasaran program tersebut.

Dari wawancara dari Bidan di Puskesmas Meliau, Ibu D. Widyawati Amd, Keb. menjelaskan :

*“Untuk urutan pemilihan kontrasepsi bagi pria ini berarti terdapat kesempatan bagi peserta KB*

*untuk menentukan pilihannya, tetap prasyarat pertama adalah alat kontrasepsi untuk pria itu harus cocok secara medis, ini berarti calon peserta juga harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dari pihak Dokter ataupun Bidan.”*

Dijelaskan juga oleh beliau bahwa, “Kader perlu memberikan penjelasan awal secara mantap kepada peserta KB dan calon peserta KB khususnya pria sehingga pada saat akan dilakukan pelayanan, calon peserta secara mental sudah siap untuk dimantapkan sikapnya oleh petugas medis dan siap untuk dilayani.”

Dari beberapa informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari parainforman maka peneliti menarik kesimpulan bahwa masalah terbesar dalam implementasi program KB Pria terletak pada kesadaran masyarakat yang masih rendah serta jaringan komunikasi yang kurang baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program yang ada antara lain dengan meningkatkan jaringan komunikasi yang ada.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Komunikasi yang terdapat dalam Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Meliau Hilir telah dilakukan dengan cukup baik, dikarenakan adanya transmisi informasi antar implementor yang lancar, kejelasan informasi yang dilakukan dan adanya konsistensi informasi yang disampaikan. Namun penyuluhan, bimbingan, motivasi, dan konseling kepada masyarakat khususnya bagi kaum

pria yang juga merupakan bentuk dari komunikasi yang masih perlu ditingkatkan lagi.

2. Disposisi atau sikap pelaksana khususnya kader KB di Desa Meliau Hilir dapat dikatakan cukup baik. Selama ini, sikap dari para penerima program dalam hal ini pria, masih tergolong kurang baik. Sebagian besar masih enggan menerima program yang ada dikarenakan mereka tidak benar-benar memahami manfaat MOP itu sendiri. Mereka masih menilai bahwa MOP itu buruk. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap masyarakat terhadap program adalah sikap yang negatif. Sebagian besar dari mereka menolak adanya MOP.

### **B. SARAN**

1. Peningkatan mutu kader KB di Desa Meliau Hilir  
Peningkatan mutu kader dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
  - a. Memberikan pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan pada para kader, diharapkan segala informasi yang diterima dari petugas KB dapat disalurkan ke masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat lebih memahami program yang ada. Pendidikan dan pelatihan ini hendaknya dilakukan minimal 1 bulan sekali agar kader lebih memahami tentang tugas dan segala sesuatu terkait dengan program yang ada, serta dapat mengikuti perkembangan informasi yang ada.

- b. Mengadakan perlombaan pembuatan program kerja, untuk melatih agar kader memiliki inovasi baru dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana bagi pria di Desa Meliau Hilir.
2. Perbaiki Jaringan Komunikasi  
Hal ini dapat ditempuh dengan cara:
  - a. Menggiatkan penyuluhan, bimbingan, motivasi, dan konseling mengenai MOP di Desa Meliau Hilir dan Kader memanfaatkan pertemuan para bapak-bapak yang biasanya diselenggarakan sebulan sekali dan dalam pertemuan yang ada PLKB atau kader ikut mengisi satu acara yaitu sosialisasi mengenai KB Pria.
  - b. Petugas atau kader melakukan pendekatan langsung kepada para peserta MOP agar mau memberikan keluh kesahnya selama ber-KB dalam suatu forum.
3. KB dikelola secara profesional.  
Hal ini dapat ditempuh dengan cara:
  - a. Kolaborasi antara pemerintah dan institusi masyarakat. Selama ini pemerintah hanya mengarahkan dan mengkoordinir Kader, padahal Kader itu tenaga sukarela. Seharusnya untuk pemberian informasi dan hal-hal lain diharapkan ada kolaborasi atau perpaduan, kerjasama, kemitraan antar pemerintah dan para Kader serta institusi lokal kerana selama ini kolaborasi tersebut belum nampak. Pemerintah jangan

menyalahkan Kadersaja jika program belum berjalan maksimal.

- b. Perubahan dari Kader yang tadinya hanya wanita menjadi Kader Pria. Bisa dimulai dari tim BKKBN yang mulai diperkuat dengan petugas-petugas pria. Sedang di masyarakat dapat dirintis dari petugas PLKB Pria mengajak para bapak-bapak yang ber-KB agar mau menjadi Kader. Jika Kader KB adalah pria, terlebih para pria yang ikut KB maka diharapkan dapat menyadarkan para pria bahwa KB bukan hanya untuk wanita.

#### 4. Variasi Program KB

Hal ini dapat ditempuh dengan cara promosi penggunaan MOP melalui iklan di media massa. Seseorang yang memiliki pengaruh besar di negara seperti Presiden, tokoh agama, dan masih banyak lagi mempromosikan bahwa ia adalah pengguna MOP, lalu ia mengajak untuk melakukan MOP. Pemberian pilihan alat kontrasepsi lain bagi pria. Hingga saat ini hanya ada 2 pilihan alat kontrasepsi bagi pria, sedangkan untuk wanita ada berbagai alat. Jika ada pil KB atau suntik KB bagi pria, dimungkinkan perantara pria dalam ber-KB dapat meningkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*

- Kebijakan Negara Cetakan II Edisi II*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Unirta Press. : Jakarta.
- Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. Chicago. Holt, Rineheart and Winston.
- BKKBN. 1989. *Pedoman Tata Cara Kerja PLKB/PKB dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Jakarta.
- BKKBN. 1993. *Pedoman Operasional Pendidikan KB: Tingkat Kecamatan dan Desa*. Jakarta.
- BKKBN. 1993. *Buku Pegangan Kader KB: Pertemuan Efektif, Teknik Kerja Sama dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta.
- Hardiyanto. 2001. *Revitalisasi Peran Institusi Masyarakat Pedesaan Dalam Program KB Nasional*. Jakarta.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media: Yogyakarta.
- Grindle, M. 1980. *Political and Policy Implementation in The Third World*. Prenceton Univercity Press.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. ITS Press: Surabaya.
- Saifuddin, Abdul Bari. 2010. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi Edisi Kedua*. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo: Jakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Cetakan I*. Puslit KP2W Unpad: Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset & YPAPI: Yogyakarta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Mandar Maju: Bandung.
- Winarno, Budi. 2000. *Teori Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.
- Sumber lainnya :**
- Ariwibowo, AA. 2010. *Program KB Kalbar Terhambat*. (online). <http://www.antarane.ws.com/news/214217/program-kb-kalbar-terhambat>. Di unduh 16 Juni 2012.
- Miank Budi. 2008. *Kendalikan Angka Kelahiran dengan KB*. (online). <http://www.scribd.com/doc/94514877/Kendalikan-Angka-Kelahiran-Dengan-KB>. Di unduh 16 Juni 2012.
- M .Sidik, Jafar. 2012. *Telah ditemukan pil KB untuk pria*. (online).

<http://www.antaranews.com/berita/312531/telah-ditemukan-pil-kb-untuk-pria>. Di unduh 13 Juni 2012.

Ekarini , Sri Madya Bhakti. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Partisipasi Pria Dalam*

*Keluarga Berencana Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali*. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. (<http://eprints.undip.ac.id/18291/>) di unduh 10 November 2013.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage: <http://jurnal.mahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email: [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : EKA HARIYANTI SUSANTO  
NIM / Periode lulus : 601107004 /  
Fakultas/Jurusan : ISIP / IA  
E-mail address/HP : ekahariyantiususanto@yahoo.co.id / 085252496615

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....\*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria  
Di Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten  
Sanggau

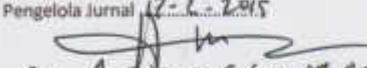
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain):

- secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal 12-1-2015  
  
Dr. Anis Hani, S. Sos. M. A. B.  
NIP. 197107021997021002

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal: 17 Februari 2015  
  
(Eka Hariyanti Susanto)  
nama terang dan tanda tangan mhs

**catatan:**  
\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).